

ABSTRAK

PERAN TNI-ANGKATAN LAUT DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA TERTENTU DI KAWASAN LAUT

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan yang terjadi diwilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dapat dilaksanakan oleh Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, akan tetapi terhadap pelaksanaan penegakan hukum dimaksud tidak hanya dilakukan oleh Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut melainkan dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah TNI-AL mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan di kawasan laut ?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah dengan meninjau peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, serta ditambah dengan studi pustaka yang diperoleh melalui buku-buku yang berkaitan dengan peranan TNI Angkatan Laut dalam Bidang penegakan hukum

Bahwa pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana diwilayah perairan laut telah melakukan berbagai kebijakan, baik melalui kebijakan legislasi, yakni membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan mengenai keamanan wilayah perairan laut dan mengenai berbagai tindak pidana diwilayah perairan laut seperti tindak pidana perikanan, tindak pidana di bidang pelayaran. Maupun kebijakan membentuk forum atau badan tertentu yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan pengamanan wilayah perairan laut, seperti Badan Koordinasi Keamanan Laut.

Penulis memberikan saran kepada Setiap aparat institusi penegak hukum, baik kepolisian, TNI Angkatan Laut, maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil hendaknya menyadari pentingnya koordinasi lintas sektoral guna mengoptimalkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana diwilayah perairan laut. Sehingga tercipta keseragaman pola tindak dan harmonisasi antara ketiga instansi dalam rangka penanganan tindak pidana perikanan

Kata Kunci :Peran, Tindak Pidana Tertentu, Kawasan Laut.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan masalah	2
1.3. Tujuan	6
1.4. Kegunaan	6
1.4.1 Kegunaan teoritis	6
1.4.2 Kegunaan praktis.....	7
1.5. Keaslian.....	8
1.6. Metode penelitian.....	9
1.6.1 jenis penelitian	9
1.6.2 metode pendakatan	10
1.7. Teknik pengumpulan data.....	11
a. Bahan hukum primer.....	11
b. Bahan hukum sekunder.....	12
1.8. Analisis Bahan hukum.....	12

BAB II TINDAK PIDANA TERTENTU DIWILAYAH PERAIRAN LAUT INDONESIA

2.1. Sejarah singkat TNI-AI dan wilayah laut indonesia.....	14
2.1.1. Laut teritorial kepulauan.....	15
2.1.2. Zona Tambahan	16
2.1.3. Landas Kontinen.....	16
2.1.4. Zona Ekonomi Eklusif.....	17
2.2. Pidana Laut Tertentu	19
2.2.1 Tindak pidana perikanan illegal fising.....	21
2.2.2 Tindak pidana pelayaran	26

2.2.3	Tindak Pidana Diwilayah Perairan Laut yang Berkaitan dengan ilegal logging	28
2.2.4	Tindak pidana Laut yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan ,.....	30
2.2.5	TNI-AL Berwenang Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana TertentuNDiwilayah Perairan laut Indonesia	33

BAB III Upaya Pemerintah Dalam Melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Diwilayah Perairan Laut Indonesia

3.1	Upaya Pemerintah Dalam Melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Diwilayah Perairan Laut Indonesia.....	40
3.2	Hambatan Yang Dihadapi TNI Angkatan Laut Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Diwilayah Perairan Laut Indonesia.....	45
3.3	Proses Pelaksanaan Penyidikan TNI-AL dalam Menangani Pidana di Kawasan Laut.....	46
3.4	Optimalisasi Peran TNI Angkatan Laut Dalam Bidang Penegakan Hukum Guna Melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Diwilayah Perairan Laut Indonesia.....	48
3.4.2	Peningkatan sarana dan prasarana penegakan hukum.....	50
3.4.3	Kerjasama Lintas Sektoral Yang Jelas Dan Terarah Diantara Lembaga Penegak Hukum.....	51
3.4.4	Peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia	53

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN 56

4.2. SARAN 58

DAFTAR PUSTAKA 60